

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik identitas etnis sangat dekat dengan masyarakat dan atau Negara yang multietnis. Kelompok-kelompok etnis sebagai atau tidak terlepas entitas budaya mereka. Pada kondisi masyarakat ini perselisihan politik etnis sering kali masih menjadi persoalan. Karena kesadaran etnis melekat, tidak hanya pada tataran budaya tetapi sampai dengan kesadaran identitas diri dan manusianya. Relasi-relasi politik etnis diperkuat oleh kepentingan-kepentingan ekonomi pada beberapa kasus. Perselisihan etnis di Jerman berkaitan dengan para pekerja migran yang banyak mendapat posisi kerja, dan tuntutan otonomi di Indonesia akibat politik sentralisme dan ketidakadilan ekonomi dan politik antar pusat dan daerah semasa rezim otoritarian.¹

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya multietnis dengan berbagai kasus yang terjadi dikarenakan adanya perselisihan antar etnis, keterlibatan etnis khususnya dalam pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) merupakan sebuah fenomena baru yang perlu ditetapkan sebagai disiplin ilmu tersendiri, melihat pentingnya kajian tentang politik identitas etnis setelah ditetapkan otonomi daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, khususnya kajian tentang demokratisasi politik lokal di

¹ ...

Indonesia.² Studi keterlibatan identitas etnis dalam proses demokratisasi di aras local dikatakan sebuah fenomena baru dan sangat penting karena telah banyak studi ilmiah yang terpusat pada konflik elit-elit politik local dalam memperebut dan mempertahankan kekuasaan, serta dinamika politik local yang hanya terfokus pada konflik politiknya tanpa melihat lebih jauh lagi terkait fenomena politik yang terjadi di daerah, seperti adanya keterlibatan etnis dalam dinamika politik di daerah.³ Kasus-kasus dengan studi identitas etnis sebenarnya sudah banyak terjadi di era-era sebelumnya, banyak kasus yang terjadi seperti penolakan kepala daerah oleh masyarakat etnis daerah karena penetapan gubernur dan wakil gubernur secara terpusat dan dikatakan tidak memihak kepada daerah. Misalnya, Sam Ratulangi yang berasal dari Manado, pernah tidak diterima baik oleh elit dan masyarakat etnis Sulawesi selatan sebagai gubernur Sulawesi.⁴

Diakui bahwa kurangnya keterlibatan etnis pada Pilkada di masa lalu khususnya di era otoritarian Orde Baru, pemerintah di era ini tidak menginginkan terbentuknya pemerintahan lokal yang kuat, karena takut hal tersebut dapat mengancam kepemimpinan pusat dan lebih gawat lagi mengundang saporatisme.⁵ Salah satu cara mencegah

² _____ Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 'Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah' atau disingkat 'Pilkada'. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

³ _____ Kajian tentang praktek politik elit local dan dinamika politik local sudah banyak yang menyinggunginya. Misalnya karya Rusdi J. Abbas, SIP., MA, *Demokrasi Di Aras Local "Praktek Politik Elit Local Di Maluku Utara*, Yogyakarta: Cerahmedia, 2012; Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009; Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Leiden: KITLV Press, 2007. Namun semua karya-karya itu belum bisa dimasukkan ke dalam karya khusus dengan focus pembahasan tentang keterlibatan identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah. Khususnya di Indonesia sampai saat ini masih kurang focus pembahasan tentang keterlibatan etnis dalam pemilihan kepala daerah dalam karya-karya ilmiah yang telah ada. Baik itu, skripsi, tesis, dan disertasi.

⁴ _____ Gubernur Sulawesi Selatan setelah Sam Ratulangi dijabat oleh etnis Makasar, yaitu Laonto Daeng Pasewang

⁵ _____ Melihat banyak daerah yang menginginkan kemerdekaan dan kekuatan-kekuatan local yang dapat mengganggu eksistensi rezim yang sangat otoriter pada waktu itu, selengkapnya lihat, Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, hal. 467.

menguatnya pemimpin lokal adalah dengan menenpatkan para pegawai 'nasional' dari Jakarta ke tingkat daerah.⁶ Pada masa Orde Baru, pasangan calon gubernur-wakil gubernur diseleksi serta diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun penetapannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Keterlibatan etnis dalam mempertahankan calon gubernur yang mereka pilih sampai berujung pada konflik, namun konflik yang terjadi pada saat itu bersifat vertical antara elit politik nasional yang dikuatkan dengan rezim berkuasa dibelakang mereka dan elit politik daerah yang didukung oleh masyarakat etnis.⁷ Semenjak kekuasaan rezim Orde Baru, daerah dikuasai oleh pemerintah pusat yang dikenal dengan sistem sentralistik sehingga daerah-daerah di Indonesia dalam proses pembangunan kurang efektif dan tidak ada aktualisasi potensial daerah secara objektif. Bertolak dari kejagalan kebijakan politik pusat yang sentralistik, diskursus tentang desentralistik atau pelimpahan kekuasaan mulai dan semakin didiskusikan di kalangan pengamat demokrasi, akademisi, dan praktisi bahkan masyarakat pada umumnya.⁸

Akan tetapi setelah ditetapkannya otonomi daerah dan diberlakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada bulan juni 2005 memberi angin segar kepada daerah dalam proses pengelolaan dan aktualisasi pembangunan secara langsung oleh daerah dan membuka ruang bagi elit-elit

⁶ _____ Banyaknya pegawai-pegawai dari pusat yang menguasai tempat-tempat strategis di pemerintahan local pada masa era Orba Baru (Orba), Lihat, Henk Schulte Nordholt dan Gerri van Klinken, *Ibid*, hal. 467.

⁷ _____ Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1989, hal. 23.

⁸ _____ Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, 'Otonomi Daerah' adalah hak, wewenang, dan kewajiban 'Daerah' untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Selanjutnya yang dimaksud dengan "Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah", adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus

politik lokal untuk ikut serta dalam Pilkada yang dipilih secara langsung oleh masyarakat tanpa intervensi dari pusat.⁹

Banyak masalah yang terjadi dalam Pilkada diberbagai daerah setelah adanya pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan secara langsung oleh daerah, masalah seperti politik uang, kampanye hitam, perebutan kekuasaan di daerah, konflik antar agama, politisasi etnis dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan lain yang terjadi setelah peralihan tanggungjawab dari pemerintah pusat ke daerah terkait pemilihan kepala daerah.¹⁰ Seperti yang terjadi dalam Pilkada di Sumatera Selatan, dimana pendukung Syahril Oesman menuding adanya pengelembungan suara di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengakibatkan kemenangan tipis Alex Noerdin. Selain itu kisruh pilkada juga terjadi di Tana Toraja Sulawesi Selatan Tahun 2010. Kerusuhan dipicu ketidakpuasan ratusan pendukung dua pasangan calon bupati dan Wakil bupati, yakni Nikodemus Biringkanae-Kendek Rante dan pasangan Victor Datuan Bata-Rosina Palloan, atas hasil penghitungan sementara pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan beberapa lembaga survei. Kerusuhan itu menyebabkan 1 orang tewas dan 10 orang luka berat dan ringan. Kerusuhan juga mengakibatkan sejumlah bangunan kantor pemerintahan rusak, seperti Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Gedung DPRD, Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR), dan rumah dinas Bupati Tana

⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan 'Mahkamah Konstitusi' yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

¹⁰ Terjadi konflik antar agama di Poso dalam perebutan kekuasaan politik, kasus pemekaran di Sulawesi Barat dan Pulau Mentawai, serta kasus-kasus lain yang terjadi di daerah memperlihatkan

Toraja Johannes Amping Situru. Ketidakpuasan warga terhadap hasil Pilkada juga terjadi di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di Soppeng, massa merusak Kantor KPU Soppeng dan dua kantor kecamatan, yakni Takkalala dan Lalabata. Sementara di Maros, massa melempari Kantor Kecamatan Tabralili dengan bom molotov. Kerusuhan akibat rasa tidak puas terhadap hasil Pilkada juga pernah terjadi pada tahun 2006 di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kerusuhan itu mengakibatkan beberapa bangunan umum seperti Pendopo Kabupaten Tuban hangus dibakar massa.

Meskipun demikian, terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, Pilkada masih bisa dikatakan sebagai sebuah proses demokratisasi politik di aras lokal, dimana adanya partisipasi langsung masyarakat dalam rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga adanya hubungan yang baik antara elit dan massa, dan juga hubungan antara pusat-daerah. Pilkada juga dianggap sebagai jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara pusat dan daerah dalam penentuan kepala daerah, proses ini bukan hanya karena melihat pada kegagalan aktualisasi pembangunan dan perpolitikan pada masa Orde Baru, tetapi juga untuk mempercepat demokratisasi di aras lokal walaupun masih banyak kejanggalan dalam melaksanakan substansi dari Pilkada itu sendiri.

Persaingan etnis semakin bergejolak terjadi di daerah setelah ditetapkan pemilihan secara langsung pasca runtuhnya rezim Orba Baru, keterlibatan etnis dalam mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur, pasangan walikota-wakil walikota dan pasangan bupati-wakil bupati kerap berujung pada konflik antar etnis. Pembelaan etnis terjadi disetiap Pilkada dengan dasar persamaan etnis antara massa pendukung dengan pasangan calon yang diusungkan oleh partai seperti yang terjadi pada kasus Pilkada

gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007 dan kemudian pada Pilkada Tana Toraja, Sulawesi Selatan 2010.

Persoalan terkait keterlibatan etnis dalam Pilkada juga terjadi pada Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007, Maluku Utara yang memiliki dua kota serta enam kabupaten dengan jumlah penduduk sebesar 944.276 jiwa, dilihat dari komposisi etnis yang ada di Maluku Utara, terdapat empat kelompok etnis terbesar menurut jumlah, kualitas SDM, dan keterwakilan mereka di lembaga pemerintahan daerah. Etnis-etnis tersebut: Pertama, etnis Makian (45%) yang terbesar merata diseluruh wilayah Maluku Utara dengan konsentrasi paling banyak berada di daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kota Ternate. Kedua, etnis Tobelo/Galela (25%), yang tersebar di Halmahera Barat dan Halmahera Timur. Ketiga, etnis Sanana (20%) yang tersebar di daerah Kepulauan Sula. Keempat, etnis Ternate/Tidore (10%) yang tersebar di daerah Kota Ternate, Kota Tidore, dan Halmahera Tengah. Diantara empat etnis yang tersebar di Maluku Utara, etnis Makian yang mendominasi secara keseluruhan baik secara kuantitas maupun kualitas SDM yang mereka miliki.¹¹ Ini yang kemudian setiap calon kepala daerah yang mendapatkan dukungan dari etnis Makian sangat kuat dan berpeluang besar menang dalam Pilkada.

Keterlibatan etnis dalam Pilkada Maluku Utara sangat nampak, secara terbuka etnis memperlihatkan keberpihakannya pada pasangan calon gubernur-wakil gubernur, namun perbedaan dengan kasus sebelumnya, yang terjadi di Maluku Utara masyarakat etnis sebagai pemilih lebih melihat pada latar belakang garis keturunan, kandidat yang

mereka dukung secara langsung berlatar belakang etnis yang sama seperti mereka. Keterlibatan etnis pada Pilkada Maluku Utara sering menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan antar etnis pendukung yang mengakibatkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larutnya proses Pilkada, karena adanya ketidakpuasan dari pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang kalah dengan melibatkan etnis pendukungnya mengakibatkan terjadinya benturan antar etnis pendukung calon gubernur-wakil gubernur. Hal ini terjadi karena atas dasar keterikatan persamaan etnis seperti pendukung calon gubernur-wakil gubernur Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba (Armaiyn-Kasuba), yaitu dari etnis Makian, Tobelo dan Galela dengan etnis pendukung calon gubernur-wakil gubernur Abdul Gafur-Abdurahim Fabanyo (Gafur-Fabanyo), yaitu dari etnis Tidore, Weda, Petani, Gebe dalam Pilkada gubernur-wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, keterlibatan etnis dalam Pilkada hanya akan menguntungkan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab yang mencoba memobilisasi etnis dalam Pilkada demi kepentingan mereka, hal ini sangat merugikan daerah dalam proses pembangunannya dan dapat merusak kesadaran politik masyarakat, serta merusak persatuan dan keutuhan daerah. Di sisi lain, hal tersebut juga dapat memperlambat demokratisasi di daerah dan aktualisasi tugas-tugas daerah yang diberikan oleh pusat sebagai proses desentralisasi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan etnis dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana keterlibatan etnis dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.
2. Mengetahui alasan mengapa etnis ikut terlibat mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007.
3. Mengetahui mobilisasi atau pengerahan massa etnis dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.
4. Mengetahui bentuk-bentuk dukungan etnis dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan social tentang keterlibatan etnis dalam Pilkada, serta dinamika pembangunan dan perpolitikan di daerah,

2. Secara Praktis

Dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua sebagai makhluk sosial, agar dapat saling menerima dan menghargai perbedaan etnis yang ada di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang tertarik pada kajian etnis di aras lokal khususnya di Maluku Utara.

E. KERANGKA TEORITIS

Kerangka dasar teori adalah gambaran atau batasan – batasan tentang teori – teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan sehingga aktifitas penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Adapun teori-teori yang digunakan untuk melihat keterlibatan etnis dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007, yaitu:

1. Politik Identitas

Politik identitas adalah politik yang focus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh seperti persoalan politik yang dimunculkan akibat problematika gender, feminisme dan maskulinisme, persoalan politik etnis yang secara dasarnya berbeda fisik dan karakter fisiologis, dan pertentangan-pertentangan yang dimunculkannya, atau persoalan-persoalan politik karena perbedaan agama dan kepercayaan dan bahasa.¹²

Agnes Heller seperti yang dikutip oleh Abdillah mendefenisikan politik identitas

sebagai politik yang memfokuskan perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori

politik yang utama yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (Free Play), walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan, dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, biofeminisme, dan perselisihan etnis.¹³

Donald L Morowitz seperti dikutip oleh Nuraida Muji dalam artikelnya mendefinisikan politik identitas adalah merupakan pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota dan bukan anggota dengan serta merta dapat bersifat permanen.¹⁴

Selanjutnya Kamala Chandakirana seperti dikutip oleh Nuraida Muji menyebutkan bahwa:

“Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi ‘orang asli’ yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi ‘orang pendatang’ yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar dijadikan alat memanipulasi, alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”.¹⁵

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan pengertian politik identitas adalah perbedaan-perbedaan yang mendasari pada kelompok-kelompok tertentu, seperti ciri fisik, bahasa, agama, dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan sebagai pemisahan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya.

Menurut Klaus Von Beyme seperti dikutip oleh Abdilah menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni:

¹³ _____ *Ibid*, hal. 22.

¹⁴ _____ Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, *Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau ancaman bagi masa depan kebhinnekaan Indonesia*, Diakses dari Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sospol Univ. Jember, pada tanggal 03-01-15 jam 17:45.

¹⁵ _____ *Ibid*, tanggal 03-01-15 jam 17:45.

1) “Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya”;

2) “Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar”;

3) “Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik dari ilmu.”¹⁶

Erich Fromm seperti dikutip oleh Abdilah melihat masalah identitas sebagai suatu persoalan yang sulit diklasifikasikan dalam hubungannya dengan perasaan, afeksi, dan sikap. Identitas sepadan dengan permasalahan “integritas”. Seseorang yang tidak memiliki identitas yang jelas atau kabur dapat dikatakan sebagai individu yang tidak punya integritas pribadi yang kuat.”¹⁷

Selanjutnya Stuart Hall seperti dikutip oleh Abdilah juga menyebutnya sebagai:

“sesuatu yang tidak pernah sempurna, selalu dalam proses dan selalu dibangun dari dalam”.¹⁸

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan identitas yaitu identitas dari etnis-etnis mayoritas di Maluku utara, pembatasan ini dilakukan karena melihat keterlibatan pada Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara hanya etnis-etnis mayoritas yang mendominasi seperti etnis Makian, Ternate, Tidore, Tobelo, Galela, Patani, Maba dan Sula (Sanana), dibandingkan kelompok-kelompok etnis lain yang secara kuantitatif sangat minoritas dan terdominasi karena sebagai kelompok etnis pendatang.

2. Kelompok Etnis

Kelompok-kelompok etnis terbentuk karena adanya ciri yang ditentukan oleh kelompok itu sendiri. Ciri ini disebut identitas yang sangat menentukan ada dan tidaknya suatu kelompok etnis seperti, bahasa, ciri fisik, budaya, agama. Misalnya etnis Cina dengan bahasa dan budaya dapat memperlihatkan dan membedahkan mereka dengan kelompok-kelompok etnis lain, seperti etnis Jawa, Sunda, Minang, Papua, dan sebagainya. Menurut Fredrich Barth, istilah etnis menunjukkan pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.¹⁹ Sedangkan etnis menurut Narroll, 1994 seperti dikutip oleh Fredrik Barth. Adalah:

“ suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, dapat membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dengan ciri populasi kelompok lain ”.²⁰

Selanjutnya Max Weber seperti yang dikutip Sofyan Sjaif mendefinisikan kelompok etnis sebagai:

“Identitas kelompok atas dasar kepercayaan yang sama dari segi kultur, common descent, dan bahasa”.²¹

Untuk mempertegas maksud dari Weber tentang kelompok etnis seperti yang dikutip Sofyan Sjaif adalah sekelompok manusia tertentu yang secara subjektif memiliki kesamaan keyakinan dari nenek moyang karena adanya kesamaan tipe-tipe fisik atau

¹⁹ _____ Fredrik Bart, *Kelompok Etnis Dan Batasan-Batasannya*, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 11-12

²⁰ _____ Narroll, dalam, *Ibid*, hal. 11

²¹ _____ Sofyan Sjaif, *Politik Etnis: Disamping Politik Lokal di Kendari, Yayasan Busteka Olah Indonesia*

kebiasaan atau keduanya, atau memiliki sejarah akibat penjajahan dan imigrasi. Weber juga merumuskan empat prinsip utama terkait etnisitas. Keempat prinsip yang dimaksud, yaitu: 1) etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok; 2) etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik; 3) keberagaman bentuk kelompok etnis dari organisasi sosial; dan 4) etnisitas dan mobilisasi politik.²²

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan etnis di Maluku Utara adalah suku tertentu yang bisa dikatakan sebagai suku mayoritas di Maluku Utara, suku yang telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, yang masih tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka. Suku-suku tersebut yang kemudian dikenal dengan etnik Ternate, Tidore, Makian, Tobelo, Galela, Patani, Maba, dan Sula (Sanana), yang secara mayoritas mendominasi di Maluku Utara dibandingkan dengan etnis lain sebagai etnis pendatang yang secara kuantitatif sangat sedikit jumlahnya seperti etnis Papua, Jawa, Bugis, Ambon, Manado dan lainnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik yang akan dibicarakan disini yaitu partisipasi politik yang dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan perantara atau pihak ketiga. Kegiatan partisipasi ini dilakukan dengan adanya mobilisasi dari pihak lain, seperti partisipasi kelompok etnis dalam Pilkada Maluku Utara dengan adanya mobilisasi dari kelompok kepentingan, partisipasi dalam Pilkada Maluku Utara juga tidak pada persoalan

... dalam Pilkada tetapi partisipasi dalam memenangkan pasangan calon gubernur dan

waki gubernur dalam Pilkada Maluku Utara. Milbrath dan Goel seperti dikutip oleh Saiful Arif membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis, yakni orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator, yakni orang yang setidak-tidaknya pernah mengikuti pemilihan umum. Ketiga, gladiator, yakni mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik. Keempat, pengkritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.²³ Sedangkan partisipasi menurut Keith Faulks adalah :

“...keterlibatan individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka”²⁴

Selanjutnya Subakti, membagi partisipasi masyarakat dalam politik ke dalam empat kategori:

- 1) Seseorang cenderung berpartisipasi aktif apabila ia memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi.
- 2) seseorang cenderung berpartisipasi pasif tertekan apabila ia memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah.
- 3) apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah rendah, maka bisa digolongkan sebagai militan radikal
- 4) apabila kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka bisa digolongkan sebagai partisipasi tidak aktif.²⁵

²³ _____ Saiful Arif, *Demokratisasi Sistem Politik Dan Pemerintahan*, AVERROS PRES: Program Sekolah Demokrasi, Malang, 2011, hal. 37.

²⁴ _____ Keith Faulks, *Sosiologi Politik*, Helmi Mahadi dan Shohifullah (Penerjemah): Nusa Media, Bandung, 2012, hal. 226.

²⁵ _____ *Demokratisasi Sistem Politik Dan Pemerintahan*, PT Grafindo, 2010.

a. Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan partisipasi politik, Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik menjadi.²⁶

1. Kelas: individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau Komunal: individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan: individu-individu yang jarak tinggal (domisilinya) berdekatan.
4. Partai: individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih dan mempertahankan control atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. Golongan atau Faksi: individu-individu yang dipersatukan dengan interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan petron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

b. Bentuk Partisipasi Politik

Dalam proses untuk mengetahui seperti apa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok etnis dalam hal ini maka perlu pembahasan mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik, di bawah ini beberapa bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson seperti yang dikutip oleh Seta Basri, adalah sebagai berikut:

²⁶ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 9-10.

1. Kegiatan Pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi baik itu sebagai anggota maupun pimpinannya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok untuk membangun hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan Kekerasan (violence), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, terror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.²⁷

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah sebagai proses demokratisasi, dengan teori ini penulis dapat melihat perilaku pemilih dan faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga cenderung memilih calon yang memiliki kesamaan etnis, karena melihat kuatnya pengaruh etnis dalam memobilisasi pemilih berdasarkan kelompok etnis yang terjadi dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.

F. DEFENISI KONSEPSIONAL

Defenisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan yang lainnya agar tidak terjadi

kesalahpahaman atau kerancuan. Konsep adalah defenisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala yang dimaksud atau konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karekteristik kejadian, hal ini digunakan agar dalam penulisan tidak terjadi kesalahpahaman.

Defenisi konsepsional yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Politik Identitas

Politik identitas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah identitas sosial dari etnis-etnis mayoritas di Maluku utara, pembatasan ini dilakukan karena pada Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara hanya masalah etnis yang menjadi factor konflik.

2. Kelompok Etnis

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan etnis di Maluku Utara adalah suku tertentu yang bisa dikatakan sebagai suku mayoritas yang terlibat dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007. Suku yang telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat, yang masih tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas mereka. Suku-suku tersebut yang kemudian dikenal dengan etnik Ternate, Tidore, Makian, Tobelo, Galela, Patani, Maba, dan Sula (Sanana), yang secara mayoritas mendominasi di Maluku Utara dibandingkan dengan etnis lain sebagai etnis pendatang yang secara kuantitatif sangat

3. Partisipasi Politik

Partisipasi adalah keterlibatan atau keikutsertaan warga Negara dalam mengambil keputusan, Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah sebagai proses demokratisasi, dengan teori ini penulis dapat melihat perilaku pemilih dan faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga cenderung memilih calon yang memiliki kesamaan etnis, karena melihat kuatnya pengaruh etnis dalam memobilisasi pemilih berdasarkan kelompok etnis yang terjadi dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.

G. DEFENISI OPERASIONAL

1. Etnis

Etnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah etnis mayoritas di Maluku Utara yang ikut terlibat mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007, pembatasan ini dilakukan karena pada Pilkada tahun 2007 waktu itu hanya etnis mayoritas saja yang ikut terlibat. Seperti, etnis Makian, Tobelo, Galela terlibat mendukung pasangan Armayin-Kasuba dan etnis Tidore, Weda, Patani, Gebe terlibat mendukung pasangan Gafur-Fabanyo.

2. Partisipasi

Partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat keterlibatan atau keikutsertaan etnis dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007. Partisipasi yang dimaksud

bukan dalam hal teknis kelompok etnis membantu penyelenggara pemilu, tetapi pada keterlibatan etnis mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, seperti alasan dan bentuk-bentuk dukungan serta mobilisasi yang terjadi dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007.

H. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Moleong menyebut metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan laporan dan foto-foto.²⁸

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif, analisa dilakukan dengan melihat kondisi yang sebenarnya terhadap fenomena pergulatan politik identitas etnis yang terjadi di Maluku Utara dengan studi kasus keterlibatan etnis dalam mendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007 yang pendukungnya diklasifikasikan berdasarkan etnis di Maluku Utara, dan hasil akhirnya dimenangkan oleh pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba yang mendapat dukungan dari etnis Makian, Tobelo, dan Galela.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara atau interview, yaitu data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer, data yang diambil harus berupa dokumen original atau material mentah dari pelaku yang disebut.²⁹ Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian itu dilakukan., data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tidak tersedia dinamakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sumber tertulis yang meliputi Jurnal, laporan riset, surat kabar dan peraturan hukum. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi serta jaminan kebenaran dari informasi yang didapatkan dalam penelitian terkait politik identitas etnis dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini, yaitu: 1) teknik wawancara; 2) studi literatur. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang diteliti, seperti sekretaris KPUD, anggota DPRD, Aktivistis mahasiswa dan unsur-unsur terkait lainnya. Dengan teknik wawancara, peneliti akan memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data, dimana terjadi komunikasi secara verbal antara komunikator dan komunikan. Sedangkan studi literatur

seperti kajian pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan cara menseleksi dan menganalisis berbagai sumber tertulis dan dokumen terpercaya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber tertulis atau dokumen terpercaya yang dimaksud seperti jurnal, majalah, laporan riset, peraturan hukum dan surat kabar.³⁰

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, karena dengan metode ini peneliti dapat menggali informasi langsung secara mendalam dari informan. Wawancara kepada masyarakat bertujuan untuk mengetahui lebih jelas tentang keterlibatan etnis dalam Pilkada dan bagaimana praktik politik yang terjadi di Maluku Utara dengan menguatnya politik identitas etnis. Setelah peneliti mendapatkan informasi melalui wawancara kepada informan terkait pergulatan politik identitas etnis di Maluku Utara.

Adapun narasumber dan informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Unsur etnis pendukung Taib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba (Armaiyn-Kasuba) dua orang;
- 2) Unsur etnis pendukung Abdul Gafur-Abdurahi Fabanyo (Gafur-Fabanyo) dua orang;
- 3) Unsur etnis yang netral dan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta unsur lainnya yang terlibat pada Pilkada waktu itu;
- 4) Unsur-unsur pejabat terkait seperti Ketua KPUD Maluku Utara 1 orang, DPRD 2 orang, dll.

³⁰ Riteratur dan dokumen yang dimaksud adalah karya tulis yang masuk dalam kategori karya

4. Teknik Analisis Data

Baik data primer seperti data hasil wawancara maupun data sekunder seperti data studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersibat informasi kualitatif semuanya diolah menjadi data kualitatif. Menurut Miles dan Habermas, data kualitatif merupakan sumber deskripsi yang luas dan kokoh yang memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat, dan dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, dan dapat pula memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.³¹

Selanjutnya, data kualitatif dianalisis dan dideskripsikan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai penafsiran penulis. Menurut Robert Bogdan dan Taylor, teknik analisis kualitatif akan menghasilkan data kualitatif berupa deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan dari para pelaku yang diamati.³² Alasan penulis memilih teknik analisis kualitatif karena dengan teknik ini penulis dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis dan juga dapat membantu penulis memperoleh banyak penjelasan tentang dinamika politik etnis yang terjadi dalam Pilkada gubernur-wakil gubernur Maluku Utara tahun 2007.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan studi ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori,

³¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Habermas dalam, *Op. Cit.*, hal. 284.

³² Matthew B. Miles dan A. Michael Habermas dalam, *Op. Cit.*, hal. 284.

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi demografis Maluku Utara seperti kondisi sosial, komposisi agama, komposisi penduduk, dan kondisi budaya masyarakat Maluku Utara. Selanjutnya juga akan dibahas mengenai kondisi ekonomi dan lingkungan hidup masyarakat Maluku Utara serta dinamika politik dan pemerintahan yang terjadi di Maluku Utara.

BAB III Keterlibatan Etnis Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Di Maluku Utara Tahun 2007

Selanjutnya pada bab ini akan dibahas terkait keterlibatan etnis dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2007 dari tahap proses persiapan, proses sosialisasi, proses pendaftaran, proses kampanye, proses pencoblosan, sampai pada proses rekapitulasi suara. Disini akan diulas semua terkait dengan keterlibatan etnis dalam setiap proses diatas, serta mobilisasi etnis yang terjadi dalam Pilkada, juga bentuk-bentuk dukungan etnis dan alasan dukungan etnis pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2007.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir hanya berisi kesimpulan dan saran